

## Kantor Hukum EPZA Adukan 3 Hakim .....

Dari Halaman 1

Nasution (Hakim Ketua Majelis); Andi Hendra Dwi Bayu Putra (Hakim Anggota) dan Azzahrawi (Hakim Anggota).  
Eka Putra Zakran SH MH selaku pimpinan Kantor EPZA, didampingi timnya dari Kantor Hukum EPZA, diantaranya: Ronal Syafriansyah, SH, Chairul Anwar Lubis, SH dan Rizalman SH selaku kuasa hukum dari klien berinisial R yang sebelumnya disebut Tergugat II Intervensi, dan sekarang disebut Pemanding dalam upaya hukum banding di PT TUN Medan.  
Selanjutnya, R disebut dalam surat pengaduan ini sebagai Pengadu. Ia sangat keberatan atas isi putusan Majelis Hakim Judex Facti tersebut, sehingga dengan terpaksa harus membuat pengaduan guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.  
Sebab, kuat dugaan Majelis Hakim Judex Facti berat sebelah dan mengenyampingkan semua fakta persidangan.  
"Artinya, kami menilai ada permainan antara Muhammad Bairi Indra selaku Terbanding, sebelumnya adalah Penggugat dalam perkara a quo," ungkap Eka Putra Zakran.  
Pria yang akrab disapa EPZA ini menyatakan, membaca isi putusan Majelis Hakim Judex Facti PTUN Medan, banyak ditemukan kejangalan.

"Pertama, soal melampaui kewenangan. Sejatinnya perkara a quo ditolak, alias NO (Niet Ontvankelijke verklaring). Karena terkait pembatalan buku nikah antara klien kami (R) dengan Muhammad Bairi Indra telah sah menikah secara Islam pada tanggal 4 April 1985 dan telah dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Dolok Masihul. Hal ini dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/72/IV/2006, tertanggal 09-04-2013. Jadi kenapa dibatalkan buku nikah itu," tanya Epza.  
Masih menurut Epza, disamping itu, terkait kewenangan pembatalan buku nikah ini sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, nah kewenangannya berada di Pengadilan Agama, bukan di pengadilan TUN.  
Hal lain, sambung Epza, Hakim Judex Facti dianggap telah nyata-nyata lalai dan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan.  
"Sebut saja pengugat. Penggugat hanya menghadirkan 1 orang saksi, sementara dalam perdata 1 saksi tidaklah cukup. Ini diatur dalam Pasal 1895, Pasal 1902 dan Pasal 1904 hingga Pasal 1912 KUH Perdata. Sementara klien kami Tergugat Intervensi/ Pengadu, selain menghadirkan semua bukti-bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi, tapi bukti dan saksi klien kami dikesampingkan. Makanya saya katakan, kuat dugaan hakim tersebut 'bermain', sehingga putusannya berat sebelah. Pendeknya, bila diurai satu persatu banyak yang janggal," jelas Epza.

Lebih jauh Epza menjelaskan, "Terkait kronologis masalah hukum antara klien kami (R) dengan Muhammad Bairi Indra, bermula dari kasus pidana di Polres Belawan atas dugaan tindak pidana Kawin Halangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHP atas nama Pelapor berinisial R dan Terlapor Muhammad Bairi Indra dan Nuriyah. Keduanya pada bulan Oktober 2024 lalu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Tiba-tiba, mengajukan penangguhan dengan alasan sudah mendaftarkan gugatan di PTUN Medan, sehingga sampai saat ini perkara tersebut ditangguhkan, sampai menunggu putusan hakim inkrah dari pengadilan."  
"Nah, akibat putusan Hakim Judex Facti yang dianggap menciderai keadilan masyarakat, maka klien kami saat ini mengajukan upaya hukum banding di PT TUN Medan. Dan untuk memastikan perkara tersebut berjalan efektif dan tidak ada hakim yang bermain dalam perkara ini, maka kami selaku kuasa hukum, selain melaporkan perkara ini ke Bawas Mahkamah Agung RI, juga ke KY RI, tembusannya kepada Ketua MA, Ketua PT TUN Medan dan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo. Harapannya, baik Bawas maupun KY RI berkenan untuk memeriksa dan memberikan sanksi tegas kepada ketiga hakim Judex Facti tersebut. Semoga keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua." (A-10)

## Elite PDIP Desak .....

Dari Halaman 1

pertanggungjawaban atas kegagalan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu karena dianggap gagal dalam pelaksanaan Pilkada 2024.  
"Saya enggak tahu, kita punya hak enggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua," kata Deddy.  
"KPU Bawaslu Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Enggak apa-apa, kalau kita perlu mundur berjamaah saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini loh," imbuhnya.  
Menurut dia, putusan MK juga menunjukkan kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam melaksanakan pemilu. Menurut Deddy, tudingannya bukan tanpa alasan, apalagi merujuk putusan MK terkait pilkada.  
Deddy terutama menyoroti total permohonan sengketa pilkada yang mencapai 310 dari total pelaksanaan pilkada di 545 daerah. Menurut dia, 310 permohonan adalah lebih 60 persen dari jumlah total.  
Namun, kata dia, bukan berarti di luar 310 tanpa masalah. Terlebih, dari 235 pilkada yang tak dibawa ke MK, 37 di antaranya merupakan kotak kosong. Sehingga, persis hanya tersisa 198 daerah.  
"198 daerah itu bukan berarti tidak bermasalah, either pelanggaran terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang udah capek," kata dia.  
Deddy mengaku kesal sebab beban anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) kini justru dibebankan kepada rakyat lewat anggaran pemerintah daerah. Padahal, PSU sepenuhnya murni kelalaian KPU dan Bawaslu sejak awal. (cnni/js)

## Pemerintah Tentukan Awal Puasa .....

Dari Halaman 1

Meski begitu, Nasaruddin meminta semua pihak untuk menunggu hasil sidang Isbat (penetapan) awal bulan Ramadan 1446 H yang digelar Kementerian Agama pada Jumat (28/2) esok. Di forum tersebut, lanjutnya, pemerintah akan memutuskan kapan awal Ramadan akan dimulai.  
"Besok kita sidang Isbat. Besok kita tentukan," kata dia.  
Sebelumnya pakar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sempat memprediksi awal

puasa Ramadhan 2025/1446 Hijriah berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah.  
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaludin, memperkirakan awal Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada 2 Maret 2025.  
Menurut Thomas posisi Bulan saat magrib pada 28 Februari 2025 di Banda Aceh berada di ketinggian 4,5 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sementara di Surabaya, ketinggian Bulan 3,7 derajat dan elongasi 5,8 derajat.  
Posisi tersebut sedikit melebihi kriteria kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang

mensyaratkan ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat untuk menentukan awal bulan Hijriah.  
"Posisi Bulan masih cukup rendah dan dekat dengan Matahari, sehingga sulit diamati," ujar Thomas dalam video di kanal YouTube miliknya, dikutip Senin (24/2).  
Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan akan jatuh pada 1 Maret 2025. Muhammadiyah menetapkan ini berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1446 H atau Idulfitri jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. (cnni/js)

## Kejagung Buka Peluang Panggil Ahok .....

Dari Halaman 1

Ohar menegaskan pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu.  
"Siapa pun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapa pun," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (26/2).  
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.  
Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina Internasional.  
Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jengala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jengala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.  
Terbaru yakni Direktur Pemasaran Pusat

dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.  
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.  
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun. (cnni/js)

## Taiwan 'Dikepung' 45 Jet Tempur .....

Dari Halaman 1

selama 2025.  
Dalam rilis resmi, Kementerian Pertahanan Taiwan mencatat 45 pesawat tempur dan 14 kapal perang mondar-mandir di dekat pulau itu dalam 24 jam terakhir hingga pukul 06.00 pagi waktu setempat.  
Menurut perhitungan AFP, jumlah pesawat tempur China yang terdeteksi di dekat Taiwan mencetak rekor terbanyak sejak 11 Desember 2024.  
Laporan ini muncul setelah Taiwan menyatakan China menggelar latihan tempur pada Rabu (26/2).

Latihan tersebut melibatkan pesawat terbang dan kapal perang. Taiwan juga menyebut China menggelar "latihan tembak langsung" di wilayah sekitar 74 km lepas pantai pulau itu.  
Kemenhan Taiwan mengecam tindakan China dan menyebut sebagai pelanggaran terhadap norma internasional.  
"[Kami meminta China] mengendalikan diri secara rasional dan segera menghentikan provokasi militer," lanjut Kemhan Taiwan.  
Merek lalu mendesak masyarakat internasional untuk terus memperhatikan keamanan Selat Taiwan dan kawasan serta bersama-sama mengutuk tindakan China.  
Menanggapi latihan tersebut, Taiwan men-

girim pasukan untuk memantau pergerakan China.  
"Untuk memberi peringatan, dan menanggapi dengan tepat," demikian menurut Taiwan.  
Kementerian Luar Negeri China tak memberi komentar soal kecemasan Taiwan.  
China memang kerap menggelar latihan di dekat Taiwan. Latihan mereka bisa dalam skala besar dan intensif jika pemerintah Taiwan bikin gara-gara misalnya mengunjungi negara lain.  
Taiwan selama ini ingin memisahkan diri dari China. Namun, pemerintahan yang berbasis di Beijing menegaskan akan melakukan segala upaya bila perlu dengan paksa untuk mempertahankan pulau itu. (cnni/js)

## Tiga Anggota PWI Sumut Resmi Dipecat .....

Dari Halaman 1

gota PWI atas nama Austin EA Tumengkol (NTA: 02.00.16765.13B), Ahmad Rivai Parinduri (NTA: 02.00.16752.13B) dan Drs M Syahrir M.I.Kom (NTA:01.00.5342.95B).  
Pada surat itu juga diputuskan terhitung 17 Februari 2025 Austin EA Tumengkol, Ahmad Rivai Parinduri dan Drs M Syahrir M.I.Kom, bukan lagi anggota PWI dan tidak berhak menggunakan semua atribut PWI dan mengatasnamakan PWI dalam setiap tindakannya.  
Putusan ini kemudian disampaikan kepada seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota, dan seluruh pengurus PWI Sumut oleh Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE, dalam rapat Pengurus Harian dan Ketua-ketua Seksi PWI Sumut plus seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota se-Sumut melalui zoom meeting, Kamis

(27/02/2025).  
Dalam rapat itu, Farianda menyebutkan bahwa tiga anggota PWI Sumut yang juga sebagai pengurus harian yakni Austin EA Tumengkol (Wakil Ketua Bidang Siber dan Multi Media), Ahmad Rivai Parinduri (Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial) dan Drs M Syahrir M.I.Kom (Ketua Dewan Kehormatan Provinsi).  
Dengan keputusan Pengurus PWI Pusat, lanjut Farianda, maka segala hak dan kewajiban tidak lagi diterima. "Dengan putusan tidak lagi sebagai anggota PWI, maka segala hak dan kewajibannya gugur dengan sendirinya," ujar Farianda.  
Selain tiga pengurus PWI Sumut yang diberikan sanksi, ada lima anggota PWI Sumut yang terindikasi melanggar keputusan dan instruksi PWI Pusat perihal pelaksanaan HPN 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tapi menghadiri HPN di Pekanbaru, Riau.  
"Untuk nama-nama yang lima itu, kita

tunggu laporan dari PWI Kabupaten terkait mereka berada, yang selanjutnya akan kita laporkan ke PWI Pusat. Biarlah PWI Pusat yang menentukan apa sanksinya," ujar Farianda.  
Adapun kelima nama tersebut adalah Hizad Sembiring (Deliserdang), Ilham Ridwan (SIWO PWI Sumut), Misno (Langkat), Sajari (Langkat), dan Suhaimi Hasibuan (Batubara).  
Dalam rapat yang dipandu Sekretaris PWI Sumut, SR Hamonangan Panggabean, itu juga dibacakan surat keputusan PWI Pusat oleh Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan, Amrizal.  
Pada kesempatan itu, Farianda mengajak kepada seluruh anggota PWI di Sumut untuk tetap solid dalam menjalankan roda organisasi dibawah pimpinan Hendrik Ch Bangun. "Mari kita tunjukkan jika anggota PWI Sumut solid dan tetap satu komando, di bawah pimpinan Farianda Putra Sinik," tegas Farianda. (A-04)

## Didenda Rp48 Miliar .....

Dari Halaman 1

pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Trenggono dalam rapat di Komisi IV DPR, Kamis (27/2).  
Trenggono mengatakan pemberian sanksi kepada keduanya setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti. Dia menyebut kedua pelaku juga telah menyatakan kesediaan membayar denda tersebut.  
"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan," katanya.  
Menurut Trenggono, kasus pagar laut di Tangerang berbeda dengan kasus di Bekasi,

Jawa Barat. Menurut dia, kasus pagar laut di Bekasi di bawah tanggung jawab PT TRPN.  
Pemerintah, kata Trenggono, juga telah menjatuhkan sanksi kepada PT tersebut. Mereka juga telah melakukan pembongkaran secara mandiri atas pagar laut yang telah mereka pasang.  
"Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administrasi sesuai peraturan yang berlaku," katanya.  
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Keempat tersangka itu yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod,

SP dan CE selaku Penerima kuasa.  
Keempat tersangka itu dinilai telah terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menggunakan surat palsu.  
Surat itu kemudian dipakai untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak hingga akhirnya berhasil diterbitkan total 263 sertifikat atas nama warga desa.  
Dari hasil pemeriksaan diketahui apabila aksi pemalsuan dokumen yang dilakukan Arsin Cs itu semata-mata karena faktor ekonomi.  
Namun, Bareskrim mengaku masih terus mendalami besaran keuntungan yang didapat oleh masing-masing tersangka dari hasil pemalsuan dokumen itu. (cnni/js)



Dari Halaman 1

mengurangi pahala puasa. Konten Tidak Bermanfaat: Video atau postingan yang kurang mendidik bisa mengalihkan fokus dari ibadah.  
Untuk itu gunakan media sosial dengan bijak, pilih konten yang bermanfaat, dan kurangi konsumsi media yang tidak mendukung ibadah.  
Smartphone, laptop, dan gadget lainnya bisa menjadi pengganggu utama dalam menjalankan ibadah. Banyak orang lebih sibuk dengan game online, drama, atau hiburan lainnya daripada meningkatkan kualitas ibadah.  
Gunakan teknologi untuk mendukung ibadah, seperti aplikasi Al-Qur'an digital, pengingat waktu shalat, dan kajian online. Buat jadwal penggunaan gadget agar tetap seimbang antara hiburan dan ibadah.  
Di bulan Ramadan, waktu sangat berharga. Namun, banyak orang justru menghabiskannya dengan binge-watching film atau bermain game berlebihan yang membuat lalai dari ibadah seperti tadarrus dan shalat malam. Untuk itu batasi konsumsi hiburan dan gantikan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku Islami atau mendengarkan ceramah.  
Era digital membuat orang mudah tergoda untuk memamerkan ibadahnya, seperti unggahan jumlah rakaat shalat malam, jumlah sedekah, atau khataman Al-Qur'an. Niat yang awalnya untuk berbagi inspirasi bisa berubah menjadi riya' atau pamer, yang justru mengurangi keikhlasan dalam ibadah.  
Solusinya periksa niat sebelum membagikan aktivitas ibadah. Jika ingin berbagi motivasi, pastikan tujuannya benar-benar untuk menginspirasi, bukan untuk mencari pengakuan.  
Meskipun teknologi memudahkan komunikasi, era digital juga membuat orang lebih sibuk dengan dunia maya daripada bersilaturahmi langsung dengan keluarga dan tetangga. Ramadan adalah waktu yang baik untuk mempererat hubungan, namun jangan sampai interaksi online menggantikan interaksi nyata.  
Solusi adalah memanfaatkan momen Ramadan untuk bertemu keluarga dan terbuka bersama secara langsung. Seimbangkan antara interaksi digital dan kehidupan sosial nyata.  
Era digital menawarkan kemudahan, tetapi juga tantangan bagi pelaksanaan ibadah puasa. Kunci utamanya adalah mengontrol penggunaan teknologi agar tetap produktif dan mendukung ibadah, bukan sebaliknya. Dengan kesadaran dan pengelolaan waktu yang baik, kita bisa menjalani Ramadan dengan lebih berkualitas dan penuh keberkahan.  
Ramadan bukan sekadar bulan puasa, tetapi juga momentum bagi setiap Muslim untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Alah berfirman dalam Al-Qur'an: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)  
Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Untuk mencapai derajat takwa, ada beberapa karakter yang harus kita tanamkan dalam diri selama Ramadan dan seterusnya: Beribadah di bulan Ramadan bukan sekadar rutinitas, tetapi harus dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah. Keikhlasan inilah yang membuat ibadah kita bernilai di sisi-Nya.  
Hamba yang bertakwa senantiasa memperbanyak amal shaleh, seperti shalat malam, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersewaka, dan membantu sesama. Ramadan adalah waktu terbaik untuk melipatgandakan kebaikan.  
Puasa mengajarkan kita untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan emosi, amarah, serta godaan maksiat. Hamba yang bertakwa mampu mengendalikan dirinya dan selalu bersikap sabar.  
Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang sekadar menahan makan dan minum." (HR. Bukhari). Oleh karena itu, menjaga lisan dan akhlak adalah bagian dari ketakwaan.  
Ketakwaan sejati tidak hanya ditunjukkan selama Ramadan, tetapi juga setelahnya. Jika setelah Ramadan kita tetap istiqamah dalam ibadah dan menjauhi kemaksiatan, maka itu tanda bahwa Ramadan benar-benar membentuk kita menjadi hamba yang bertakwa.  
Ramadan adalah madrasah (sekolah) yang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT. Jika kita bisa mempertahankan kebiasaan baik yang kita bangun selama Ramadan, maka insyaAllah kita akan termasuk dalam golongan hamba yang bertakwa.  
Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Aamiin.